

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fraud atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah kecurangan, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bentuk apapun. *Fraud* dalam banyak jenis dan modus sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas bisnis. Kecurangan dapat terjadi di sektor privat maupun juga pada sektor publik sejak bertahun-tahun yang lalu hingga sekarang. Segala cara telah dilakukan guna mencegah dan mengatasi serangkaian kecurangan yang terjadi. Mulai dari meningkatkan pengawasan, memperkuat fungsi pada setiap bagian, memberikan sanksi hukum yang berat kepada pelakunya, namun hal itu masih saja tidak membuat kecurangan menjadi berkurang.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Kecurangan dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu, penyalahgunaan asset perusahaan, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Menurut penelitian Robert Cockerall (auditor Ernst & Young) didalam makalahnya "*Forensic Accounting fundamental : Introduction to the investigations*" menyatakan suatu lingkungan profil *fraud* mencakup beberapa hal yaitu kesempatan, motivasi, indikator, konsekuensi *fraud*, metode dan objek *fraud*. Tujuan *fraud* adalah sarana yang digunakan guna mencapai motivasi kecurangan. Indikator kecurangan memiliki pengertian adanya gejala – gejala

yang merujuk kepada bukti kecurangan. Metode pada kecurangan adalah cara-cara yang dilakukan untuk menjalankan *fraud*. Namun, konsekuensi kecurangan ialah dampak *fraud* yang terjadi di suatu instansi/organisasi pemerintahan khususnya di lingkup kegiatan pekerjaan umum.

Kecurangan akuntansi dapat ditunjukkan dari tingkat korup suatu negara (Gaviria, 2003). Hasil riset *Indonesian Transparency* pada akhir tahun 2015 merilis, Indonesia menempati urutan 88 negara terkorup dari total 175 negara. Peringkat Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura bahkan negara berkembang yang lain seperti Srilangka. Sedemikian tinggi tingkat korupsi negara kita ini, dan mengakar pada seluruh lapisan dan tingkatan masyarakat, baik pada pemerintahan kita maupun swasta. Hal ini dapat dilihat pada bukti hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Mardiasmo (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan audit pemerintah di Indonesia. Yakni tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintah, ketidakefektifan dan ketidakefisienan pelaksanaan pengauditan.

Di Indonesia sendiri keberadaan auditor internal pada sektor pemerintah telah mengaturnya didalam PP No.60 tahun 2008 yang berisi mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pemerintah membentuk dua badan yang mengayomi auditor internal yaitu Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP). Seseorang yang mengaudit atau auditor yang masuk di kedua badan tersebut kemudian dinamakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau disingkat APIP. Pemerintah juga membentuk lembaga yang memiliki tugas sebagai pengusut atau pengungkap terhadap kasus-kasus

kecurangan yang berada di Indonesia yang disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengungkap segala kasus-kasus yang terjadi dan merugikan pemerintah. Meskipun pemerintah telah memiliki dua badan audit internal dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna meminimalisir serta mengungkap segala bentuk kecurangan, namun kasus korupsi atau kecurangan pada pemerintah masih banyak terjadi dan sepertinya sulit untuk dihilangkan.

Dari beberapa kasus yang muncul di Indonesia, auditor internal sering juga tidak bisa mendeteksi adanya *fraud* dan ada pula yang ditemukan melakukan kerjasama atau kolusi dengan beberapa klien yang terlibat guna beberapa kasus kecurangan yang dilakukan tidak dilaporkan. Hingga saat ini Indonesia masih bermasalah dengan yang namanya kecurangan atau sering disebut dengan masalah korupsi. Pemerintah telah mengembangkan berbagai cara guna mengatasi serta menanggulangi hal ini. Namun, berbagai cara yang ditempuh oleh pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengungkap.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan adalah moralitas individu. Instansi pemerintah atau organisasi juga mempunyai tanggungjawab moral. Tanggungjawab ini berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*Fraud*). Semakin rendah moral dari seseorang diasumsikan dapat mendorong tindakan kecurangan. Hasil penelitian Xu (2008) dalam Puspitasari, Dewi (2013) auditor dengan memiliki penalaran moral rendah cenderung tertarik dengan insentif ketika hendak melaporkan adanya tindakan kecurangan. Jika menyampaikan tindakan kecurangan memberikan keuntungan baginya, maka ia akan melaporkannya. Namun jika tidak memberikan keuntungan kepadanya, ia tidak melaporkannya. I Made Darma Prawira dkk

(2014) dalam penelitiannya memiliki hasil yakni moralitas suatu individu memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* atau kecurangan akuntansi. Hasil penelitian oleh Gede Krisna Saputra dkk (2015) juga memperkuat penelitian oleh I Made Darma Prawira dkk (2014).

Penyebab terjadinya kecurangan ada 4 hal yang memicunya (ACFE 2009). Empat hal itu disebut dengan “*The Fraud Diamond*”. Empat penyebab tersebut yaitu: rasionalisasi (*rationalization*), kesempatan (*opportunity*), tekanan situasional (*situational pressure*) dan kapabilitas (*capability*). Tekanan Situasional merupakan salah satu hal yang muncul dari luar diri seseorang yang menyebabkan kecurangan. Tekanan situasional tersebut bisa berbentuk uang (*money*), ideology (*ideology*), koersi (*coercion*) dan ego yang muncul atau yang sering disebut model MICE. Auditor internal saat menjalankan aktivitas kerjanya tak lepas atau sering mendapat tekanan - tekanan dari luar diri sendiri, sehingga membuatnya tidak melaporkan kecurangan tersebut, bahkan ia sendiri yang melakukan kecurangan (Penelitian dari Moeller dalam Rustendi (2009)).

Auditor internal semestinya mempunyai integritas tinggi apabila dihadapkan dengan tindakan kecurangan yang muncul dalam suatu organisasi. Apabila tidak, dengan adanya berbagai tekanan yang akan muncul kedepannya akan membuat terdorong untuk melakukan kecurangan ketika melakukan pekerjaannya yaitu mengaudit. Akibatnya, auditor internal bisa saja masuk dalam kerjasama/kolusi dengan diberikan insentif guna menutupi kecurangan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Darma Prawira dkk (2015) menjelaskan bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan melakukan kecurangan

(*Fraud*). Penelitian tersebut memiliki kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Eka Ari Artini dkk (2014) bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif. Dalam penelitian yang lain oleh Gede Krisna Saputra dkk (2015) menghasilkan hasil penelitian yang sama yaitu pengendalian *intern* kas berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*.

Sistem kompensasi yang diberikan kepada karyawan pada suatu instansi adalah bentuk imbalan/balas jasa dari pekerjaan mereka, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial pada suatu periode. Kompensasi yang sesuai dapat menimbulkan rasa puas bagi pegawai dan suatu bentuk tindakan organisasi atau instansi guna mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Pada suatu organisasi atau instansi, kompensasi mempunyai nilai yang penting karena merupakan cerminan dari tindakan organisasi guna mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dari pengalaman yang pernah terjadi, memunculkan pemikiran bahwa kompensasi yang kurang sesuai bisa menyebabkan penurunan prestasi, motivasi, dan kepuasan kerja pada karyawan, bahkan bisa menjadi penyebab karyawan berpotensi keluar dari organisasi atau instansi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Mirza Zulkarnain (2013) memiliki hasil yaitu kompensasi mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan atau *fraud*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Novita Puspitasari, Meutia Karunia Dewi (2015). Selain itu, masih banyak ditemukannya beberapa kasus kecurangan di Indonesia membuat penelitian ini menarik untuk didalami. Walaupun Indonesia telah melakukan berbagai cara guna mengurangi timbulnya kasus kecurangan namun masih saja

ada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang baik dalam swasta maupun instansi pemerintah. Yang menjadikan penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang sebelumnya yaitu peneliti melakukannya di instansi - instansi pemerintah di kota Semarang. Selain itu dalam penelitian ini menggabungkan dari penelitian sebelumnya oleh Novita Puspitasari, Meutia Karunia Dewi (2015) dengan penelitian dari Ribstein (2002) dan Chruich et al (2001), dengan memasukkan 1 variabel kesesuaian kompensasi sebagai variabel independen terhadap kecenderungan melakukan *fraud*. Fenomena yang banyak terjadi ternyata seseorang pelaku kecurangan (*fraud*) tidak puas atas kontribusi yang ia berikan kepada perusahaan dengan kompensasi yang diberikan perusahaan kepadanya. Ketidakpuasan individu tersebut yang diperkirakan dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini dilakukan dengan mengetahui pemahaman pertanggungjawaban atas laporan keuangan di Pemerintah Kota Semarang guna mengetahui ada atau tidaknya kecenderungan terhadap kecurangan didalam organisasi tersebut dengan mengambil beberapa faktor yang berpengaruh. Diantaranya, faktor - faktor itu ialah penalaran moral/moralitas, tekanan situasional, pengendalian internal, dan kompensasi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah serta hasil yang didapatkan dari penelitian sebelum ini, penelitian dilakukan guna mengetahui macam-macam hal yang terjadi pada kecenderungan melakukan kecurangan pada Instansi Pemerintah Kota Semarang yang akan dijelaskan dengan empat variabel. Empat variabel

tersebut antara lain adalah variabel moralitas individu, tekanan situasional, keefektifan pengendalian internal dan kompensasi guna menjawab masalah :

1. Apakah ada pengaruh kecenderungan kecurangan antara individu yang memiliki moralitas tinggi dan rendah ?
2. Apakah terdapat pengaruh tekanan situasional individu dengan level moralitas tinggi dan level moralitas rendah dengan kecenderungan melakukan kecurangan ?
3. Apakah terdapat pengaruh dari keefektifan pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan ?
4. Apakah terdapat pengaruh dari Kompensasi dengan kecenderungan kecurangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bukti pengaruh individu dengan level moralitas tinggi dan rendah dalam kecenderungan melakukan kecurangan.
2. Menganalisis bukti pengaruh tekanan situasional individu dengan level moralitas tinggi dan level moralitas rendah dengan kecenderungan melakukan kecurangan.
3. Menganalisis bukti pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Menganalisis bukti pengaruh sistem kompensasi terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan manfaat yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Kecurangan (*Fraud*) pada sektor pemerintahan dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya Kecurangan (*Fraud*).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan serta meningkatkan kinerja bagi para auditor dan lembaga-lembaga yang berwenang didalamnya mengenai kecurangan (*Fraud*) yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dengan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dapat terjadinya kecurangan (*Fraud*) dan dapat meminimalisir atau menghindarkan sistem pemerintah yang dikelola pemerintahan dari terjadinya Kecurangan (*Fraud*).